

Judul : Petani dan Buruh Kawal Reforma Agraria
Tanggal : Senin, 14 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Petani dan Buruh Kawal Reforma Agraria

Regulasi yang tengah dibahas terkait reforma agraria harus dapat mengoreksi ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik agraria, mendistribusikan tanah kepada rakyat, dan mengakhiri monopoli atas tanah.

**Machradin Wahyudi
Ritonga**

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai usul inisiatif DPR membawa angin segar bagi penyelesaian problem dominasi dan ketimpangan kepemilikan lahan hingga sengketa lahan. Namun, target DPR untuk membahas cepat RUU tersebut bersama pemerintah, yakni kurang dari sebulan, justru menimbulkan keraguan.

Pembahasan RUU Reforma Agraria sejatinya diusulkan sejak 2004 atau 22 tahun silam. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjadi salah satu pihak yang mendorong pembentukan Undang-Undang Reforma Agraria. Ketimpangan kepemilikan dan distribusi lahan serta sengketa yang tak kunjung berakir jadi pertimbangan.

Setiap tahun konflik lahan selalu meningkat. KPA mencatat, sepanjang 2025 terdapat 341 konflik lahan. Luas lahan yang disengketakan mencapai 914.575 hektar dan berdampak terhadap 123.612 keluarga. Jumlah ini naik 15 persen ketimbang 2024.

Rapat paripurna DPR, Selasa (8/9/2026), memutuskan RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai RUU inisiatif DPR. Targetnya, RUU dapat disahkan sebelum Hari Tani Nasional, 24 September 2026. Karena itu, meski surat persetujuan dari Presiden belum diterbitkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR yang diberi amanat untuk membahas bersama pemerintah langsung bergerak cepat.

Dua hari setelah rapat paripurna, Kamis (10/9), Baleg menggelar rapat dengar pendapat umum. Dalam rapat itu, Baleg meminta masukan dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan Urban Poor Consortium (UPC) terkait RUU

Pengaturan Reforma Agraria.

Kalangan masyarakat sipil juga tidak mau kalah cepat. Mereka berupaya terus mengawal agar regulasi yang dihasilkan nantinya tidak melencong dari semangat reforma agraria. Pasal-pasal yang dihasilkan dalam pembahasan diharapkan benar-benar melindungi hak atas tanah serta kesejahteraan bagi petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan kelompok marginal lain.

Pada Sabtu (12/9), gerakan buruh bersama gerakan reforma agraria sepakat untuk mengawal pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Mereka mengeluarkan Deklarasi Pergerakan Gerakan Agraria dan Gerakan Buruh Menyongsong UU Reforma Agraria.

Selain KPA, organisasi gerakan reforma agraria yang bergabung adalah Gerakan Reforma Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria Bersama Anggota, Serikat Petani Pasundan, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPD), dan Forum Masyarakat Anti-register (Formaster).

Sementara itu, gerakan buruh yang bergabung ialah Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPHI), dan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMID).

"Di tengah perjuangan mendorong RUU Reforma Agraria, gerakan reforma agraria dan gerakan buruh menyatukan kekuatan untuk memastikan Reforma Agraria dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR IX/2001, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-pokok Agraria," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika saat deklarasi.

Mereka menginginkan reforma agraria ini mampu



Reforma agraria menjadi salah tuntutan pengunjuk rasa saat peringatan Hari Pangan Sedunia, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Rapat paripurna DPR, Selasa (8/9), memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria sebagai RUU inisiatif DPR. Pembahasan RUU ditargetkan rampung sebelum Hari Tani Nasional pada 24 September 2026.

mengoreksi ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik agraria, mendistribusikan tanah kepada rakyat, dan mengakhiri monopoli perusahaan atas tanah dan sumber-sumber agraria. Semua itu dirangkum dalam deklarasi bertajuk Pancasila Solusi Rakyat.

"Dukungan terhadap RUU Reforma Agraria bukannya cek kosong, melainkan perjuangan untuk memastikan lahirnya undang-undang yang menjadi jalan bagi pelaksanaan reforma agraria sejati. Atas dasar se-

jarah, kepentingan dan cita-cita perjuangan bersama tersebut, Pancasila Solusi Rakyat sebagai sikap dan agenda perjuangan bersama," papar Dewi.

Lima poin

Lima poin deklarasi itu diucapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat GSBI Emelia Yanti MD Siahaan. Pertama, mereka mendesak RUU Reforma Agraria untuk segera disahkan dan berorientasi pada struktur agraria yang berkeadilan.

Kedua, menjadikan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria sebagai jantung RUU Pengaturan Reforma Agraria. Ketiga, membentuk badan pelaksana reforma agraria yang kuat, langsung di bawah presiden, dan melibatkan organisasi rakyat.

Kemudian, mendesak adanya jaminan perlindungan, penghentian perampasan tanah, pengurusan, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap rakyat. Kelima, membangun persatuan gerakan reforma agraria

dan gerakan buruh sebagai saka guru bangsa yang dijamin konstitusi dalam memegang kedaulatan agraria.

"Reforma Agraria harus menjadi modal dasar bagi industrialisasi nasional berbasis kekuatan produksi rakyat yang menciptakan lapangan kerja yang luas dan layak, meningkatkan nilai tambah produksi rakyat, mengurangi keterpaksaan migrasi desa kota, serta memperkuat daya tawar kaum buruh," ujarnya.

Ketua Umum KSPSI Jum-

hur Hidayat berpandangan, perbaikan hidup petani dan nelayan melalui reforma agraria juga bakal membuat buruh turut sejahtera.

"Ini (petani, nelayan, dan buruh) saling mengisi. Kalau petani miskin karena tidak ada reforma, ya, bakal membuka desa sejahtera, buruh juga pasti sejahtera. Daya beli yang tinggi dari daerah karena sejahtera juga membuat produksi lebih tinggi," katanya.

Hilangkan kekerasan

Jumhur mengingatkan, kekerasan aparat dalam konflik agraria juga harus dihilangkan. Pendekatan legalistik juga tidak menjamin keadilan sehingga kehadiran negara melalui RUU Reforma Agraria bisa menyelesaikan konflik agraria yang merugikan warga.

Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur juga melihat reforma agraria sebagai upaya untuk menjaga bumi yang ditempati masyarakat secara turun-temurun. Dia meyakini masyarakat yang berdi- am di tanah itu pasti lebih paham cara memilikinya dibandingkan perusahaan yang mengambil alih lahan.

"Reforma agraria pasti mendahulukan masyarakat yang sudah memilikinya dari tanah itu. Jadi, pasti lingkungan akan terpelihara dengan baik karena tujuannya adalah keberlanjutan kehidupan orang-orang yang ada di sana," kata Jumhur.

Kini, perjuangan panjang selama 22 tahun mulai menunjukkan titik terang. Namun, hal yang dibutuhkan para petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan kaum marginal lainnya bukan hanya pembahasan dan pengesahan cepat. Lebih dari itu, regulasi reforma agraria yang dibentuk juga diharapkan dapat memenuhi hak rakyat atas tanah dan kesejahteraan.